



No. Alumni Universitas:	<b>GERRY PUTRA SUWARDI</b>	No. Alumni Fakultas:
-------------------------	----------------------------	----------------------

a) Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang / 17 Juli 1994 b) Nama Orang Tua : Drs. Suwardi, MM dan Dra. Gina Mondrida c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No. BP : 1210112153 f) Tanggal Lulus : 23 Maret 2016 g) Lama Studi : 3 Tahun 7 Bulan h) Predikat Lulus : Dengan Pujian i) IPK : 3,81 j) Alamat : Komplek Batan Indah Blok E-55, RT 16 RW/04, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE* (PERAMPASAN ASET TANPA TUNTUTAN PIDANA) DALAM RANGKA MENDORONG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Gerry Putra Suwardi, 1210112153, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 101 Halaman, Tahun 2016)  
Pembimbing : Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H. dan Dr. Shinta Agustina, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Di Indonesia, aktivitas tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun semakin tidak terkendali. Praktik korupsi yang semakin tidak terkendali tersebut kemudian melahirkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Berkaitan dengan hal tersebut, selama ini penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Undang-Undang Pemberantasan Korupsi) cenderung mengutamakan jalur pidana yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana daripada perampasan aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya jalur pidana tidak cukup efektif untuk meredam, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Sejauhmanakah efektifitas pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara, 2) Bagaimanakah implementasi perampasan aset dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa tuntutan pidana) dalam rangka mendorong pengembalian kerugian keuangan negara, dan 3) Bagaimanakah komparasi pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif *NCB Asset Forfeiture* di berbagai negara lainnya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dilakukan terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, padahal dalam praktiknya terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menghambat proses pemeriksaan perkara korupsi tersebut. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui *NCB Asset Forfeiture* dapat dilakukan sebelum, sesudah atau secara bersamaan dengan proses jalur pidananya. Dalam perkembangannya, beberapa negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Swiss dan Filipina telah menerapkan sistem perampasan melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *NCB Asset Forfeiture* tanpa didasari dari kesalahan pemilik aset tersebut di dalam ketentuan undang-undang formalnya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Maret 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Apriwal Gusti, S.H.</b>	<b>Yusrida, S.H., M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

\_\_\_\_\_ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: